

198

Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam: Aspek Ekonomi, Strategis dan Keamanan*

Asnani USMAN

Perundingan penetapan batas landas kontinen ke-7 antara Indonesia dan Vietnam yang telah diadakan pada tanggal 3-9 November 1984 di Hanoi masih belum mencapai persetujuan bersama. Perundingan yang dimulai sejak tahun 1978 ini belum menemukan kata sepakat yang dapat diterima kedua pihak tampaknya karena adanya perbedaan prinsip dalam penentuan batas tersebut.

Tercapainya persetujuan batas landas kontinen ini sangat penting bagi Indonesia demi kesatuan wilayah yang menyangkut kepentingan ekonomi, strategis dan keamanan. Sedang bagi Vietnam, hal ini dapat mempunyai pengaruh positif atas citranya di kawasan Asia Tenggara.

PERMASALAHAN DAN PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Sejak Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen, Indonesia telah mengadakan perjanjian garis batas wilayah perairan dan landas kontinen dengan negara-negara tetangganya, yaitu Malaysia, Muangthai, Australia (kecuali Timor gap), India, Singapura, dan Papua Nugini. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian ini yang telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Indonesia, dengan Vietnam telah timbul rintangan yang berupa perbedaan prinsip mengenai penentuan batas landas kontinen kedua negara.

Perbedaan prinsip ini telah timbul sejak pemerintahan Vietnam Selatan yang berdasarkan Dekrit 1971 mengajukan tuntutan landas kontinennya di

*Karangan ini pernah dimuat di *Suara Karya*, 18 Desember 1984. Asnani Usman adalah staf

bagian selatan yang berbatasan dengan landas kontinen Indonesia di bagian utara Pulau Natuna. Tuntutan tersebut menyebabkan terjadinya wilayah tumpang-tindih dengan batas yang ditentukan oleh Indonesia. Sebabnya adalah bahwa Pemerintah Vietnam Selatan menarik garis batas "sama jarak" (equidistant line) antara Pantai Vietnam Selatan dan Pulau Kalimantan tanpa memperhatikan Pulau Natuna sebagai wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan prinsip Negara Kepulauan Indonesia menetapkan pengukuran garis batas dari pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Natuna. Garis batas yang berlaku ialah garis tengah. Jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis dan terbentuknya Republik Sosialis Vietnam telah menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia.

Penetapan batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam (Republik Sosialis Vietnam) kembali menimbulkan persoalan perbedaan prinsip. Vietnam menuntut bahwa suatu "trench" (parit laut) yang membentang dari Pulau Anambas sampai Pulau Natuna adalah batas landas kontinennya. Sistem ini kemudian disebutnya sebagai sistem garis batas "thalweg." Sistem ini biasanya dipakai bagi negara yang dibatasi sungai, yaitu penggunaan alur-alur terdalam sungai sebagai batas negara. Oleh karena itu Indonesia menolak sistem yang tidak lazim ini dan menginginkan garis batas yang berlaku umum, yaitu garis tengah. Akibatnya wilayah tumpang-tindih yang dipersengketakan akan bertambah luas dari sebelumnya. Walaupun demikian Indonesia bersedia memulai perundingan penetapan batas landas kontinen kedua negara terlepas dari persoalan yang timbul dengan Vietnam Selatan di masa yang lalu.

Perundingan pertama dimulai pada tanggal 5 Juni 1978 yang kemudian disusul oleh perundingan selanjutnya. Walaupun belum menghasilkan suatu persetujuan kemajuan yang dicapai bersama cukup memberi harapan. Dalam perundingan ke-2, Vietnam mengusulkan suatu "harmonized line" (pembagian yang cocok) yang membagi wilayah tumpang-tindih tersebut menjadi 55% untuk Indonesia dan 45% untuk Vietnam. Dengan usul ini wilayah yang dipersengketakan menjadi lebih kecil.

Tetapi Indonesia masih tetap berkeberatan dengan usul ini, karena jika ini disetujui dikhawatirkan hal ini menjadi preseden bagi diterimanya prinsip Thalweg dalam penetapan batas Landas Kontinen. Oleh karena itu masih diperlukan perundingan lanjutan untuk mencapai kesepakatan. Dalam perundingan ke-6 tanggal 11-16 Mei 1981, Vietnam bersedia melepaskan sistem "thalweg"-nya dan Indonesia memberikan konsesi-konsesi tertentu, misalnya kerjasama ekonomi. Tetapi Vietnam menganggap konsesi ini masih kurang, sedangkan Indonesia merasa sudah cukup. Tampaknya dalam perundingan

NILAI STRATEGIS PERAIRAN NATUNA

Kekayaan alam berupa minyak dan gas alam yang terkandung di landas kontinen yang terletak di perairan Laut Cina Selatan menyebabkan masalah penentuan batas itu tidak saja menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga mempunyai arti strategis bagi keamanan wilayah Indonesia. Landas Kontinen di perairan Natuna ini mengandung endapan gas alam yang sangat besar, diperkirakan berlipat-ganda besarnya dari endapan yang terdapat di Arun dan Bontang. Untuk memanfaatkan kekayaan alam ini, Indonesia (cq Pertamina) yang belum mempunyai teknologi yang tinggi telah mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak asing baik dalam bentuk bagi hasil maupun kontrak karya. Sekitar tahun 1971-1974 Indonesia telah memberi izin eksplorasi dan eksploitasi kepada beberapa perusahaan minyak asing, yaitu CONOCO (Amerika) dan AGIP (Italia). Pada waktu itu belum ada pendekatan untuk perundingan dengan Vietnam Selatan mengenai penetapan batas landas kontinen kedua negara.

Barulah setelah Republik Sosialis Vietnam (Vietnam dipersatukan) berkuasa, Indonesia memulai perundingan. Walaupun persetujuan bersama belum tercapai, Indonesia tetap melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi di perairan Natuna itu. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa Vietnam dalam pernyataan resminya tanggal 29 November 1979 mengecam keras Pertamina yang telah mengundang perusahaan-perusahaan minyak asing untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di perairan yang masih dipersengketakan tersebut.

Kecaman ini tidak ditanggapi oleh Indonesia, dan pada akhir 1979 dan awal 1980, Pertamina telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk eksplorasi dan eksploitasi dengan beberapa perusahaan minyak asing, antara lain Marathon Petroleum Natuna Ltd., Gulf Coy., Amoseas Indonesia, Mobil Oil, Esso Exploration (yang mengambil alih kontrak AGIP), dan Total Natuna. Kegiatan-kegiatan perusahaan minyak asing ini masih dalam tingkat penelitian dan pencarian minyak dan gas alam, kecuali CONOCO yang sudah mulai berproduksi.

Indonesia berpendirian bahwa izin itu diberikan bagi eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah perairan Indonesia, yaitu bagian dalam dari batas garis tengah yang ditetapkannya. Untuk ini Indonesia akan menjamin keamanan dan kepentingan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di perairan itu.

Melihat perkembangan ini Vietnam lalu mengadakan perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet pada bulan Juli 1980 untuk eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen bagian utara.

kawasan mana, bukan tidak mungkin perairan Natuna termasuk dalam perjanjian itu. Vietnam pun sangat membutuhkan kekayaan minyak dan gas alam yang sangat potensial di landas kontinen ini.

Dari tindakan yang ditempuh kedua negara ini, jelaslah kepentingan ekonomi telah memperkuat arti strategis dan keamanan perairan Natuna ini. Nilai strategis perairan ini disebabkan letak kawasan Laut Cina Selatan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini merupakan jalur lalu-lintas kapal-kapal negara-negara besar dengan latar belakang kepentingan nasional masing-masing.

Selain itu adanya sumber-sumber konflik yang menyangkut pemilikan pulau-pulau (Spratly, Paracel) dan batas landas kontinen yang masih dipersengketakan oleh Cina, Malaysia, Pilipina, Taiwan dan Vietnam di kawasan ini menyebabkan keamanannya makin rawan. Konflik tertentu dapat terjadi jika salah satu pihak menggunakan tindakan kekerasan dalam sengketa itu yang ditanggapi dengan kekerasan pula oleh pihak lainnya. Turut campurnya negara-negara besar untuk membela kepentingan mereka akan makin memperumit konflik yang terjadi.

Oleh karena itu wajarlah jika Indonesia memusatkan perhatian pada kawasan ini, terlebih-lebih dengan adanya tindakan-tindakan Vietnam yang dianggapnya cukup provokatif dan menyadarkan Indonesia untuk bersikap waspada. Vietnam tidak saja menuntut Pulau Natuna, mengecam izin eksplorasi yang diberikan Indonesia kepada beberapa perusahaan minyak asing dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet, tetapi juga mengintai dan membayangi kawasan minyak lepas pantai Natuna dengan pesawat-pesawat tempur.

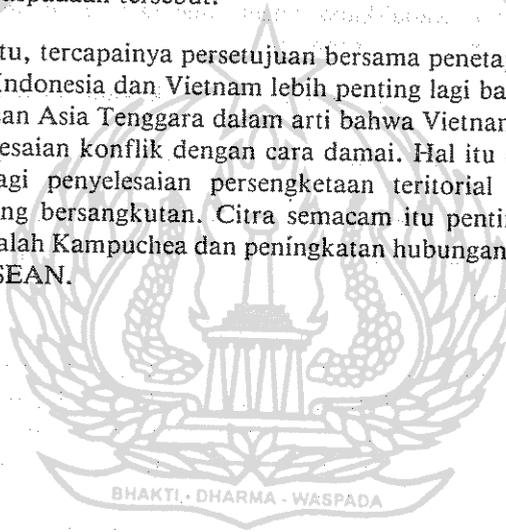
Untuk menghadapi itu semua, Indonesia telah meningkatkan pembangunan di Pulau Natuna, terutama dengan dibangunnya landasan kapal terbang yang dapat didarati oleh hampir semua tipe pesawat sipil dan militer yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu Indonesia telah mengadakan latihan gabungan ABRI di perairan Natuna ini.

KESIMPULAN

Ketidakjelasan batas-batas negara baik di perairan maupun di dasar laut akan selalu merupakan benih konflik yang harus segera diatasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Indonesia telah menyelesaikan sebagian besar perundingan batas-batas negaranya dengan negara-negara tetangga dengan baik, terutama dalam memperkuat posisi Wawasan Nusantara. Indonesia pun menginginkan hal yang sama dengan Vietnam, terlebih jika mengingat posisi

Bagi Vietnam, masalah penetapan batas wilayah dengan negara-negara tetangganya masih cukup banyak dan rumit yang semuanya merupakan benih-benih konflik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Penyelesaian konflik Kamboja dengan cara tidak damai (kekuatan militer) menimbulkan kewaspadaan negara-negara tetangganya terhadap tingkah laku Vietnam itu baik di kawasan Asia Tenggara umumnya maupun Laut Cina Selatan khususnya. Demikian pula adanya hubungan dekat Vietnam dengan Uni Soviet makin memperkuat kewaspadaan tersebut.

Oleh karena itu, tercapainya persetujuan bersama penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam lebih penting lagi bagi Vietnam demi citranya di kawasan Asia Tenggara dalam arti bahwa Vietnam dapat bersikap luwes dan penyelesaian konflik dengan cara damai. Hal itu dapat pula menjadi preseden bagi penyelesaian persengketaan teritorial lainnya dengan negara-negara yang bersangkutan. Citra semacam itu penting bagi prospek penyelesaian masalah Kampuchea dan peningkatan hubungan baiknya dengan negara-negara ASEAN.



Synthese Rencana dan Pasar: Ekonomi Hongaria

Djisman S. SIMANDJUNTAK*

Kunjungan Presiden Pal Losonczy, minat Indonesia memasuki Pasar Eropa Timur dan upaya kita sendiri untuk membentuk orde ekonomi sebagai bagian kerangka landasan pembangunan kiranya adalah latar belakang yang cocok bagi suatu uraian perkenalan tentang orde ekonomi Hongaria yang sekarang. Memang tetap dihitung sebagai bagian sosialisme tempaan Uni Soviet, tetapi orde ekonomi Hongaria telah mengalami perubahan-perubahan besar sejak kekuasaan Janos Kadar sehingga kini menunjukkan unsur-unsur yang perlu dipelajari. Orde pemilikannya, orde perencanaannya dan konstitusi perusahaannya, begitu juga yang sektoral seperti orde moneter, keuangan negara, perdagangan internasional dan sosio-ekonomi menunjukkan keunikan sebagai hasil perkawinan perencanaan sentral dengan pasar.

LATAR BELAKANG STALINISME

Sama seperti negara-negara lain di Eropa Timur yang hanyut dalam pengaruh kekuasaan Uni Soviet sesudah Perang Dunia II, Hongaria pun melakukan eksperimentasi ekonomi Stalinis. Meskipun berturut-turut menderita kekalahan besar dalam Pemilu tahun 1945 dan 1947 Partai Komunis Hongaria di bawah Matthias Rakosi tidak saja berhasil merebut kursi dalam koalisi pemerintahan, tetapi juga mendesakkan program reformasi ekonomi ala Stalin.

Dengan berbagai tipu muslihat Rakosi berhasil menegarakan atau mengolektifkan pemilikan alat-alat produksi dalam waktu singkat. Ketika Partai Komunis Hongaria merebut kekuasaan dalam tahun 1948, bagian terbesar dari pemilikan alat-alat produksi sudah dinegarakan. Semua perusahaan dagang, kerajinan dan industri dengan buruh lebih dari 10 orang sudah ditimpa nasib yang sama sedini akhir tahun 1949.

Perencanaan sentral yang imperatif pun sudah dimulai sejak tahun 1950. Perusahaan-perusahaan dikebiri hingga tidak lebih dari regu-regu pelaksana perintah ekonomi yang dikeluarkan oleh Kantor Perencanaan. Harga-harga pun ditetapkan oleh Kantor Urusan Harga dengan kemampuan yang rendah sekali untuk menyesuaikan diri dengan perubahan penawaran. Kedaulatan konsumen dicabut dalam arti bahwa perilakunya tidak dimasukkan sebagai variabel perencanaan, walaupun ia tetap adalah bebas untuk membeli atau tidak membeli. Lebih dari itu, bertitik tolak dari Model Stalin upaya pembangunan dipusatkan pada pengembangan industri berat yang secepat mungkin dengan mengorbankan industri barang konsumsi yang justru menyetuh kehidupan sehari-hari rakyat banyak.

Apa yang terjadi atas ekonomi Uni Soviet selama "Komunisme Perang" dan ekonomi Yugoslavia sebelum pendepakannya dari keluarga negara-negara komunis dalam tahun 1948 menimpa juga ekonomi Hongaria. Bukan saja target-target kuantitatif sering tidak dapat dicapai, tetapi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan pun memburuk. Bahkan tingkat upah riil menunjukkan penurunan, sementara despotisme partai mengangkat taraf hidup para pengikut setia di tengah kemelaratan petani kecil dan buruh industri. Yang diharapkan oleh Partai Komunis menjadi tulang punggungnya justru memusuhinya dan di tengah kemelut politik ketika itu kemerosotan ekonomi ini berakhir dengan kerusuhan berdarah pada akhir tahun 1956. Janos Kadar yang dalam tahun 1955 mendirikan Partai Buruh Sosialis Hongaria sebagai upaya untuk melepaskan citra buruk Partai Komunis, tampil atau ditampilkan sebagai pemimpin pemerintahan yang pada mulanya ilegal, tetapi belakangan berhasil membentuk konsensus baru yang melandasi politik luar negeri dan dalam negeri termasuk politik ekonomi.

MEKANISME EKONOMI BARU

Pengambilalihan kekuasaan oleh Janos Kadar dalam tahun 1956 tidak serta-merta diikuti oleh perubahan-perubahan besar dalam politik ekonomi Hongaria. Bahkan adalah Kadar yang memaksakan pendirian kembali usaha-usaha pertanian kolektif yang sebelumnya sempat membubarkan diri. Baru pada tahun 1968 dimulai perubahan besar dan terkenal dengan nama Mekanisme Ekonomi Baru.

Analisa Mekanisme Ekonomi Baru dapat dilakukan dengan berbagai kerangka acuan. Tetapi pendekatan sistemik kiranya harus memusatkan diri pada perubahan-perubahan dalam unsur-unsur konstitutif sistem ekonomi itu sendiri. Itu berarti pemusatan perhatian pada perubahan dalam orde pemilikan alat produksi, orde perencanaan, orde atau konstitusi perusahaan, dan kalau perlu diperinci dengan analisa perubahan dalam orde moneter, keuangan negara dan orde-orde sektoral lain.

Mekanisme Ekonomi Baru 1968, begitu juga perubahan-perubahan sistemik yang terjadi dalam orde ekonomi Hongaria sampai sekarang tidak mengandung perubahan dalam orde pemilikan alat-alat produksi. Dominasi pemilikan negara tidak pernah diusik. Ini tercermin antara lain dalam komposisi sosial Produk Material Bersih (sistem perkiraan pendapatan nasional negara-negara sosialis). Meskipun menunjukkan penurunan kecil dari 98,3% dalam tahun 1975 (sektor negara 75,4% dan koperasi 19,3%) menjadi 97,6% dalam tahun 1981 (negara 73,6% dan koperasi 19,9%), yang disebut sektor sosialis adalah sangat dominan dalam penciptaan produk nasional. Sektor swasta dengan bagian 1,7% dan 2,6% masing-masing dalam tahun 1975 dan 1981 adalah kecil sekali. Jadi walaupun Hongaria dikenal sebagai yang paling "liberal" di antara sekutu Uni Soviet dewasa ini, itu tidak benar kalau yang diperhatikan adalah orde pemilikan.

Kalau sebelum tahun 1968 ada koinsidensi antara pemilikan negara dengan perencanaan sentral, reformasi tahun 1968 melimpahkan wewenang perencanaan (pembuatan keputusan) kepada perusahaan-perusahaan. Apa yang harus diproduksi, dalam jumlah berapa, dengan kombinasi faktor yang bagaimana, berapa dari laba yang dimasukkan ke dalam cadangan, dana gratifikasi (sharing funds) dan dana investasi, pada dasarnya menjadi wewenang perusahaan. Tetapi jangan dilupakan bahwa reformasi tahun 1968 adalah reformasi dalam sosialisme dan bukan batu loncatan menuju orde masyarakat baru. Karena itu negara masih mempertahankan beberapa alat pengendalian ekonomi.

Investasi baru dan perluasan yang berskala besar masih tetap dalam wewenang negara, meskipun bagian investasi yang dibelanjai sendiri oleh perusahaan terus naik hingga mencapai 68% dalam tahun 1981. Namun demikian, pengaruh negara atas keputusan-keputusan ekonomi mikro menjadi semakin tidak langsung. Perintah rencana diganti oleh politik ekonomi yang berisi regulator-regulator ekonomi yaitu yang terdiri dari pajak-pajak dan subsidi, tingkat bunga, selektivisme dalam kebijakan kredit, regulasi (kenaikan) upah, kebijakan nilai tukar dan kebijakan harga. Lebih dari itu, pengangkatan dan pemecatan pemimpin perusahaan masih dipertahankan dalam wewenang negara. Yang terakhir inilah yang menjadi jembatan utama antara pemilikan negara dengan perencanaan desentral.

Perencanaan desentral yang berarti persaingan adalah lumpuh kalau mekanisme harga tidak dibiarkan bekerja. Harga adalah signal utama bagi pembuatan keputusan yang desentral menggantikan iterasi rumit dalam perencanaan sentral. Dan sebagaimana dapat diduga, Mekanisme Ekonomi Baru 1968 tidak sepenuhnya menyerahkan pembentukan harga pada mekanisme pasar. Di samping harga pasar masih dikenal harga administratif terdiri dari

harga tetap, harga yang boleh turun-naik antara batas atas dan bawah dan harga yang terbuka ke bawah, tetapi dibatasi oleh suatu maksimum.

Menarik untuk diketahui kiranya adalah bagian harga bebas yang secara keseluruhan naik dari 57% dalam tahun 1978 menjadi 67% dalam tahun 1980, sementara bagian terbesar dari harga administratif terpusat dalam sektor energi, pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, pertambangan dan metalurgi. Begitu juga perlu ditambahkan bahwa kebijakan subsidi negara melahirkan distorsi besar dalam harga konsumen yang dalam beberapa hal bahkan lebih rendah dari harga produsen. Tetapi secara keseluruhan perubahan dalam kebijakan harga sejak Mekanisme Ekonomi Baru 1968 adalah besar dan cenderung konsisten dengan perencanaan desentral.

BATAS REFORMASI

Adalah sulit untuk menyimpulkan sejauh mana reformasi 1968 dan yang berikutnya mendatangkan berkat bagi ekonomi Hongaria. Pertumbuhan Produk Material Bersih yang memang naik dari rata-rata 5,2% dalam tahun 1962-1967 menjadi 6,2% dalam tahun 1968-1973 adalah terlalu kasar untuk dapat dipakai menjadi indikator. Lagi pula ia turun menjadi 3,2% dalam tahun 1976-1980 karena perburukan Dasar Pertukaran Internasional sejak kenaikan harga minyak bumi 1973. Indikator lain juga hanya dapat dipakai dengan hati-hati. Keseimbangan komposisi produk nasional dengan komposisi ketenagakerjaan memang menunjukkan tingkat pemerataan yang baik, meskipun harus dicatat bahwa dalam sosialisme pun adalah bukan sama rasa sama rata yang dituju. Indeks upah riil juga menunjukkan kenaikan, tetapi itu pun terganggu sejak tahun 1979.

Yang dapat disimpulkan adalah bahwa Mekanisme Ekonomi Baru yang disertai oleh pertuasan dalam hak-hak sipil seperti dalam kebebasan bersuara, kebebasan sastrawan, kebebasan bepergian dan kebebasan memilih pekerjaan tidak mengganggu prestasi ekonomi. Malahan sebaliknya, prestasi ekonomi Hongaria adalah lebih baik dibanding beberapa negara lain di antara keluarga sosialisme yang masih terjerat dalam ortodoksi komunisme. Berartikah itu bahwa Hongaria dapat melanjutkan upaya-upaya "liberalisasi"-nya?

Ketika negara ini dihadapkan dengan masalah yang timbul karena perburukan dalam Dasar Pertukaran Internasional, reaksi ketika itu (1973-1975) adalah resentralisasi. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam pembuatan keputusan ekonomi masih belum mendarah-daging. Tetapi di lain pihak urgensi penyeimbangan neraca pembayaran memperkuat kesadaran bahwa daya saing internasional harus diperbaiki terus-menerus. Untuk sementara kelompok reformis tampaknya masih unggul. Dalam tahun 1979-1980 diper-

kenalkan konsep "harga kompetitif" menurut mana harga domestik dikaitkan secara semi-otomatis dengan harga internasional. Bahkan dalam tahun 1981 terjadi pemutusan *de facto* hubungan vertikal langsung antara perusahaan-perusahaan dengan kementerian-kementerian, yang berarti penguatan kedudukan perusahaan dalam pembuatan keputusan secara desentral. Kartel-kartel raksasa pun dipecah untuk memperkuat persaingan sesama perusahaan.

Di mana batas perubahan-perubahan ini? *Pertama*, Hongaria akan tetap sebagai negara sosialis yang berkiblat ke Moskow. Hanya yang mengakui persekutuan ini akan mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem. *Kedua*, monopoli kekuasaan politis oleh Partai Buruh Sosialis begitu juga dominasi negara yang antara lain tercermin dalam bagian pengeluaran negara dalam produk nasional setinggi 60% dalam tahun 1980, harus dihormati. Namun demikian, pengalaman sejak tahun 1968 menunjukkan banyak yang dapat dilakukan dalam sistem ekonomi dan sistem sosial-budaya di antara kedua batas tersebut. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ekonomi Hongaria adalah *synthese* yang berhasil antara perencanaan pusat dan mekanisme pasar. Memang tidak sedikit yang meragukan masa depan perkawinan ini, misalnya kalau reformis menjadi maksimalis. Tetapi kalau para politisi pandai-pandai menggunakan dan mengenali kendala-kendala kekuasaan, kiranya tidak perlu dikhawatirkan bahwa pasar adalah pengantin yang mustahil bagi sosialisme.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

ILMU KEPOLISIAN